Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka HUT Ke-71 Proklamasi Kemerdekaan RI di Depan Sidang Bersama DPRI RI dan DPD RI, Jakarta, 16 Agustus 2016

Oleh:**Humas** ; Diposkan pada: **16 Aug 2016 ; 37980 Views** Kategori: [Transkrip Pidato](http://setkab.go.id/category/transkrip-pidato/)

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Selamat pagi,  
Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,  
Om Swastiastu,  
Namo Buddhaya*

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;  
Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara;  
Yang saya hormati Bapak BJ Habibie, Presiden Republik Indonesia Ketiga;  
Yang saya hormati Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia Kelima;  
Yang saya hormati Bapak Try Sutrisno;  
Yang saya hormati Bapak Boediono;  
Yang saya hormati Ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid;  
Yang saya hormati Yang Mulia para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, dan para Pimpinan Perwakilan Badan dan Organisasi Internasional.  
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,  
Hadirin sekalian yang saya muliakan.

//Marilah kita bersama-sama bersyukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas karunia-Nya kita dapat menghadiri Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-71 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.//(1)

//Hadirin yang saya muliakan,  
Kemerdekaan yang kita raih adalah jembatan untuk memakmurkan rakyat, untuk menegakkan keadilan, untuk membuat seluruh rakyat Indonesia meraih kemajuan bersama. Untuk mencapai semua itu, kita harus membangun. Bangunlah jiwanya! Bangunlah badannya! Dari Sabang sampai Merauke harus kita bangun. Dari Miangas hingga Rote harus kita bangun. Kita harus menjadi bangsa yang maju, Indonesia maju, bangsa yang berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.//(2)

//Dalam Pidato Kenegaraan tahun lalu sudah saya sampaikan bahwa Kabinet Kerja berkehendak meletakkan fondasi pembangunan nasional yang kokoh pada tahun pertama pemerintahan. Paradigma pembangunan nasional kita ubah dari yang bersifat konsumtif menjadi produktif, dari yang bersifat Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris. Regulasi dan birokrasi juga kita perbaiki secara masif seiring  dengan penerapan teknologi informasi dan telekomunikasi. Kita juga telah tetapkan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok Tanah Air khususnya di desa-desa, di daerah-daerah pinggiran dan wilayah perbatasan guna memperkuat konektivitas nasional kita//. (3)

//Berbekal pencapaian transformasi fundamental ekonomi tersebut, memasuki tahun kedua, Pemerintah bertekad melakukan percepatan pembangunan. Tahun 2016 ini dapat disebut sebagai Tahun Percepatan Pembangunan Nasional. Kita harus melangkah menuju Indonesia maju//.(4)

//Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,  
Percepatan pembangunan tersebut mutlak kita perlukan. Sudah 71 tahun Indonesia merdeka, kita belum mampu memutus rantai kemiskinan, memutus rantai pengangguran, memutus rantai ketimpangan dan kesenjangan sosial.//(5)

//Setiap Presiden Republik Indonesia telah bekerja keras, telah membanting tulang, telah berjuang untuk mengatasi tiga tantangan tersebut di masanya masing-masing. Mulai dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden BJ Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, sampai masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tantangan yang sama, juga sedang kita hadapi sekarang ini.//(6)

//Perbedaannya, kita menghadapi tantangan tersebut di tengah tatanan baru dunia, di tengah era kompetisi global. Kompetisi tidak lagi terjadi antardaerah tetapi antarnegara, antarkawasan. Sebuah era dimana semua negara saling terhubung satu sama lain, satu masalah bisa menjadi masalah bagi negara-negara di dunia.//(7)

//Sampai sekarang ekonomi global masih mengalami perlambatan. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi nasional juga terpengaruh. Namun kita patut bersyukur bahwa perekonomian Indonesia pada triwulan pertama tahun 2016 tumbuh 4,92 persen. Bahkan dalam triwulan kedua tahun ini, pertumbuhan ekonomi nasional naik menjadi 5,18 persen. Pertumbuhan ini jauh lebih besar di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia dan negara-negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan salah satu pertumbuhan yang tertinggi di Asia.//(8)

//Sementara itu, tantangan politik dan keamanan global juga semakin berat dan semakin beragam. Fenomena pergolakan politik di Timur Tengah, misalnya, berdampak pada ketidakstabilan kawasan dan memicu perluasan aksi terorisme di dunia termasuk di Ibukota negara kita.//(9)

//Masih segar dalam ingatan kita, pada tanggal 14 Januari 2016 di Jalan MH Thamrin, Jakarta, teroris mencoba menimbulkan kepanikan masyarakat. Namun mereka gagal. Bangsa Indonesia tidak bisa diteror. Modal persatuan kita sebagai sebuah bangsa sangat kuat.//(10)

//Masyarakat dunia pun memuji kecepatan, respon, dan penanggulangan terorisme yang kita lakukan. Oleh karena itu saya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus meneguhkan komitmen bersama mencegah dan melawan aksi terorisme. Mari kita tegaskan bahwa tidak ada tempat untuk terorisme di Nusantara yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.// (11)

//Hadirin yang saya muliakan,  
Pada tahun percepatan pembangunan ini, Pemerintah fokus pada tiga langkah terobosan untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial. Ketiga langkah itu adalah: yang pertama, percepatan pembangunan infrastruktur. Yang kedua, penyiapan kapasitas produktif dan Sumber Daya Manusia. Ketiga, deregulasi dan debirokratisasi.//(12)

//Melalui percepatan pembangunan infrastruktur, kita bangun sarana infrastruktur secara lebih merata di seluruh Tanah Air guna memperkuat konektivitas antarwilayah dan memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial. Akselerasi pembangunan infrastruktur logistik meliputi jalan nasional dan jalan tol, jembatan, jalur kereta api tidak hanya di pulau Jawa tapi juga di Pulau Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, dan juga dibangun  *Mass Rapid Transportation* (MRT), *Light Rail Train* (LRT), dan *commuter line*.//(13)

//Pelabuhan, sebagai perwujudan program tol laut, dan juga bandara. Sedangkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis mencakup pembangkit listrik, waduk, telekomunikasi, dan perumahan rakyat.//(14)

//Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut, baik infrastruktur logistik maupun infrastruktur strategis, tentu saja tidak melupakan kelestarian alam. Pemenuhan target rasio kelistrikan juga mengutamakan penggunaan energi baru dan terbarukan. Selain itu juga dilakukan percepatan pembangunan waduk dan embung untuk memperkuat program Ketahanan Air.//(15)

//Bersamaan dengan pembangunan infrastruktur yang mengedepankan kelestarian alam itu, Pemerintah melakukan konservasi lahan gambut dan pencegahan pembakarannya. Pemerintah tidak ada toleransi pada pelaku pembakaran lahan gambut dan hutan karena tindakan itu termasuk kejahatan kemanusiaan.//(16)

//Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,  
Dalam percepatan pembangunan infrastruktur, Pemerintah berkewajiban untuk membangun wilayah-wilayah yang marginal, wilayah-wilayah yang tertinggal dengan menggunakan dana APBN. Sedangkan daerah-daerah lain yang ekonominya menggeliat dan tumbuh, Pemerintah mendorong peran dunia usaha dan kerjasama dunia usaha dengan BUMN. Nilai investasi BUMN akan terus kita perbesar.//(17)

//Selain itu, dengan dukungan DPR, Pemerintah  melakukan teroboson dengan mengeluarkan aturan tentang Amnesti Pajak. Diharapkan basis penerimaan pajak menjadi semakin luas guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing nasional.//(18)

//Hadirin yang saya hormati,  
Di era kompetisi global, pembangunan infrastruktur fisik saja belum cukup untuk mengatasi kemiskinan, mengatasi pengangguran, mengatasi ketimpangan dan kesenjangan sosial. Terlebih Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah dimulai yang berarti persaingan di Asia Tenggara akan semakin sengit.//(19)

//Agar Indonesia bisa bersaing dalam kompetisi global maka pembangunan infrastruktur sosial, yaitu kapasitas produktif dan Sumber Daya Manusia (SDM) harus dipercepat. Dengan demikian Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam perlombaan ekonomi global, Indonesia harus menjadi ikut berlomba dan harus menjadi pemenang.//(20)

//Terkait dengan itu, Pemerintah memandang penting untuk memperluas akses masyarakat pada kegiatan ekonomi produktif, dengan mendorong kemajuan dan produktifitas sektor UMKM. Sektor yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Untuk itu, dalam dua tahun terakhir Pemerintah telah menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) per tahun dari 22 persen menjadi 12 persen pada tahun 2015, dan turun menjadi 9 persen pada tahun 2016. Pemerintah juga terus mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh KUR.//(21)

//Sedangkan dalam rangka menyiapkan SDM menghadapi kompetisi global, Pemerintah memperkuat sistem pendidikan vokasional. Melalui pendidikan vokasional, kita dapat melahirkan angkatan kerja dengan kemampuan yang relevan dengan kebutuhan industri. Di saat yang bersamaan, kita pastikan masyarakat usia produktif bisa lebih cepat mendapatkan pekerjaan.//(22)

//Pemerintah juga terus mendorong terwujudnya hilirisasi penelitian dengan memperkuat sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi dan dunia industri. Begitu juga sejumlah Sentra Teknologi dan Inovasi dibangun di tanah air untuk mendukung industrialisasi nasional. Sedangkan untuk mempercepat BUMN agar makin produktif dan menguat daya saingnya, Pemerintah mempersiapkan ‘holdingisasi’.//(23)

//Secara khusus Pemerintah Pusat mengapresiasi terobosan-terobosan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyiapan kapasitas produktif Indonesia. Termasuk kesigapan daerah dalam percepatan pelaksanaan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).//(24)

//Sidang yang terhormat,  
Tujuan Pemerintah membangun infrastruktur sosial khususnya pembangunan SDM adalah agar setiap insan Indonesia dapat mencapai potensi maksimalnya. Langkah ini dimulai dari pemenuhan nutrisi pada 1.000 hari pertama kehidupan.(25)

//Selanjutnya, dalam membangun manusia Indonesia yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing, kita tingkatkan kualitas pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial.//(26)

//Di sektor kesehatan, Program Indonesia Sehat yang memiliki tiga pilar. Pertama, penerapan paradigma sehat. Kedua, penguatan pelayanan kesehatan. Ketiga, pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berdasarkan data BPJS Kesehatan per Juli 2016, peserta JKN sudah mencapai hampir 170 juta jiwa. Jumlah sarana pelayanan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan juga terus meningkat.//(27)

//Di sektor pendidikan, sekarang ini sedang dilakukan percepatan pembagian Kartu Indonesia Pintar di seluruh pelosok Tanah Air. Perhatian Pemerintah terutama diberikan kepada anak usia sekolah 6-21 tahun dari keluarga tidak mampu. Melalui KIP diberikan jaminan untuk mendapatkan layanan Pendidikan Dasar sampai Menengah, pendidikan formal dan non formal, termasuk untuk mendapatkan ketrampilan dari lembaga kursus/BLK.//(28)

//Selain itu, juga sosialisasi nilai-nilai keutamaan dan pendidikan karakter pada anak didik. Pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan guru yang mengabdi di daerah-daerah terpencil, pulau-pulau terdepan, dan wilayah-wilayah perbatasan.//(29)

//Hadirin yang saya muliakan,  
Sebagai katalisator pembangunan infrastruktur fisik dan sosial, Pemerintah berkomitmen melakukan deregulasi dan debirokratisasi. Banyak regulasi kita sudah usang, sudah harus diperbaharui untuk menyongsong perubahan jaman.//(30)

//Maka regulasi yang membingungkan harus disederhanakan, prosedur yang rumit harus dipangkas. Deregulasi dan debirokratisasi itu kita lakukan untuk memberikan kecepatan pelayanan, kepastian, sinkronisasi, kemudahan berinvestasi, serta meningkatkan produktivitas.//(31)

//Wujud nyata adalah 12 Paket Kebijakan Ekonomi yang telah dikeluarkan Pemerintah sampai dengan awal Juni 2016. Dari 12 Paket Ekonomi tersebut, dapat saya sampaikan bahwa 96 persen perangkat regulasinya sudah selesai disiapkan. Guna mempercepat manfaat dari Paket-Paket itu, telah dibentuk Satuan Tugas Percepatan dan Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi pada tanggal 28 Juni 2016. Ke depan, diupayakan pembentukan Paket Kebijakan Ekonomi lainnya guna mempercepat peningkatan ekonomi nasional.//(32)

//Sebagai bagian dari deregulasi, Pemerintah telah mensinkronkan berbagai peraturan daerah (Perda) terkait perdagangan dan investasi. Lebih dari 3.000 Perda sudah dibatalkan karena tidak kondusif bagi kemajuan perdagangan dan kemudahan berusaha. Mencermati berbagai kesalahpahaman tentang pembatalan Perda, saya tegaskan dua hal. Pertama, sinkronisasi Perda dilakukan untuk kepentingan nasional, yang artinya termasuk kepentingan daerah. Sinkronisasi yang telah dilakukan akan membawa manfaat bagi daerah dalam menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Kedua, Perda yang dibatalkan hanya terkait urusan perdagangan dan investasi.//(33)

//Sinkronisasi dilakukan agar ada keselarasan, agar ada kesinambungan regulasi dari Undang-Undang Dasar 1945 dengan beragam regulasi di tingkat pusat hingga daerah. Tidak ada peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang berada di atas Undang-Undang Dasar 1945. Semuanya harus berada di bawah konstitusi, di bawah kehendak rakyat.//(34)

//Sidang yang saya hormati,  
Agar terobosan-terobosan yang dilakukan di Tahun Percepatan Pembangunan mampu menurunkan kemiskinan, menurunkan pengangguran, dan menurunkan ketimpangan dan kesenjangan sosial, Pemerintah menaruh perhatian besar pada empat aspek strategis.//(35)

//Aspek strategis pertama adalah mempercepat reformasi hukum untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta terus mendorong reformasi birokrasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih prima. Bagian penting dari ini adalah reformasi dalam institusi Polri dan Kejaksaan. Reformasi yang menyeluruh dari hulu sampai hilir. Bukan reformasi tambal sulam atau parsial. Untuk itu profesionalisme Polri dan Kejaksaan terus ditingkatkan. Demikian pula kualitas Aparatur Sipil Negara terus ditingkatkan agar Negara kita semakin kompetitif.//(36)

//Percepatan penggunaan Teknologi Informasi dalam sistem kerja Pemerintah juga terus dipercepat, sebagai bagian penting dari peningkatan kualitas layanan publik, efisiensi, dan pencegahan praktik korupsi.//(37)

//Selain itu dalam rangka terus menguatkan rasa keadilan, Pemerintah melakukan terobosan-terobosan dalam perlindungan terhadap kelompok marjinal. Bagi kalangan penyandang disabilitas, Pemerintah telah menargetkan lebih dari 55.000 orang penyandang disabilitas untuk menerima Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) di tahun 2016. Kemudian untuk membentengi anak dari perilaku kejahatan, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016. Perppu ini menegaskan kejahatan terhadap anak digolongkan dalam kejahatan luar biasa dan butuh penanganan yang luar biasa.//(38)

//Aspek strategis kedua adalah perombakan manajemen anggaran pembangunan. Berulang kali telah saya sampaikan bahwa kita harus meninggalkan paradigma lama, yaitu paradigma anggaran dibagi rata. Kita harus bekerja dengan paradigma baru, yaitu anggaran difokuskan untuk program-program prioritas. Esensinya adalah uang rakyat harus digunakan untuk kepentingan rakyat melalui program-program yang nyata, melalui kerja yang nyata, dan terasa manfaatnya bagi rakyat.//(39)

//Sudah tidak bisa lagi anggaran pembangunan, uang rakyat, habis untuk kegiatan operasional birokrasi seperti perjalanan dinas dan anggaran rapat yang sebenarnya dapat di-efisienkan. Begitu pula tradisi lama penggunaan kalimat-kalimat yang bersayap pada nomenklatur penyusunan anggaran harus ditinggalkan karena berujung pada ketidakefisienan penggunaan dana pembangunan.//(40)

//Aspek strategis ketiga adalah politik luar negeri. Dengan diplomasi yang kuat Pemerintah mempercepat penjajakan berbagai kerjasama pedagangan internasional dan mempertimbangkan partisipasi Indonesia di *Trans-Pacific Partnership Agreement* (TPPA), RCEP, dan lain-lainnya.//(41)

//Kita juga terus mendorong penyelesaian konflik internasional secara damai. Seperti semangat yang kita bawa saat menyerukan ajakan toleransi dan perdamaian dalam berbagai pertemuan dengan negara-negara Arab dan dengan Amerika Serikat. Baik itu melalui jalur dialog dan maupun penggunaan media sosial. Begitu pula Indonesia terus terlibat aktif dalam mendorong penyelesaian perselisihan di Laut Tiongkok Selatan melalui negosiasi dan upaya damai paska penetapan Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag.//(42)

//Kita juga mendorong penuntasan perang saudara di Suriah secara damai serta pemenuhan hak-hak kemerdekaan rakyat Palestina.//(43)

//Seiring dengan itu, kita tingkatkan kualitas perlindungan WNI di luar negeri. Melalui diplomasi menyeluruh dari berbagai jalur, kita telah berhasil membebaskan 14 WNI yang disandera kelompok bersenjata di Filipina Selatan. Melalui diplomasi pula, 2 WNI yang disandera di Papua Nugini berhasil dibebaskan. Menyelesaikan kasus WNI di luar negeri yang mayoritas terkait TKI. Hingga akhir Juli 2016, tidak kurang dari 23.651 TKI difasilitasi pemulangannya melalui berbagai cara.//(44)

//Sedangkan dalam rangka pemantapan kedaulatan, Pemerintah mengedepankan pembangunan daerah-daerah terdepan, daerah-daerah yang menjadi beranda Indonesia. Kita kembangkan daerah seperti Entikong, Natuna, dan Atambua agar dunia melihat bahwa Indonesia adalah negara besar dan setiap jengkal tanah airnya diperhatikan dengan sungguh-sungguh.//(45)

//Aspek strategis keempat adalah demokrasi, stabilitas politik, dan keamanan. Bangsa ini tidak akan produktif, tidak akan maju, tidak akan menjadi bangsa pemenang apabila tidak menghargai hak asasi manusia dan terus didera gonjang-ganjing politik. Energi kita sebagai bangsa akan habis untuk meredakan keriuhan politik daripada melakukan lompatan-lompatan kemajuan.//(46)

//Kita bersyukur sekarang ini kerjasama politik sudah kondusif dan konsolidasi politik menjadi semakin matang. Berbagai proses pengambilan keputusan politik dan pengesahan beragam produk hukum terlaksana secara demokratis.//(47)

//Kita juga bersyukur Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015 secara umum berlangsung aman, tertib dan damai. Semua terlaksana dengan tradisi demokrasi yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selanjutnya, Pemerintah bersama DPR-RI dan DPD-RI terus melakukan upaya perbaikan regulasi Pilkada, agar dapat terlaksana secara lebih baik untuk Pilkada serentak tahun 2017 dan Pilkada-pilkada selanjutnya.//(48)

//Sementara itu, kedaulatan bangsa dan keamanan masyarakat terus terjaga karena TNI dan Polri terus siaga dan tak pernah berhenti mengabdi. Pemerintah terus berupaya meningkatkan profesionalisme TNI dan Polri dengan pendekatan kesejahteraan dan modernisasi persenjataan. Pemerintah juga mendukung kemandirian industri dalam negeri untuk memasok alutsista TNI dan alat operasional Polri.//(49)

//Secara khusus saya ingin mengapresiasi keberhasilan TNI dan Polri yang sudah melumpuhkan salah satu pemimpin kelompok teroris di Indonesia, yaitu Santoso. Tetap waspada dan terus tekan potensi dan ancaman terorisme di Nusantara.//(50)

//Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,  
Kita hanya dapat membuat terobosan bagi kemajuan bangsa dan negara kalau pola pikir kita progresif, optimis, dan inovatif. Untuk itu Pemerintah terus menjalankan proses Revolusi Karakter Mental, yaitu perubahan pola pikir dan perubahan sistem yang dimulai dari berbagai institusi pemerintahan.//(51)

//Selama ini kita terkungkung oleh sikap pesimis dan tidak sadar bahwa sebagian dari hambatan kemajuan Indonesia justru datang dari diri kita sendiri. Padahal Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang pernah menginspirasi negara-negara yang terjajah untuk merdeka, bangsa yang memberikan Pancasila, memberikan Trisakti, memberikan nilai-nilai gotong royong untuk dunia. Oleh sebab itu, kita harus percaya diri, harus yakin, bahwa kita bisa menjadi bangsa pemenang.//(52)

//Hadirin yang saya muliakan,  
Di akhir Pidato Kenegaraan di depan Sidang Terhormat, saya mengajak segenap elemen bangsa untuk bersinergi mengatasi kemiskinan, mengatasi pengangguran, serta mengatasi ketimpangan dan kesenjangan sosial. Tanpa kerjasama, tanpa gotong royong, kita akan digulung oleh arus sejarah. Kita tidak menginginkan itu.//(53)

//Oleh sebab itu, apapun bidang yang saudara-saudara geluti, jadilah yang terbaik. Dengan kerja nyata bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa pemenang, dengan Kerja nyata bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa maju, menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berbudaya. Sekarang ini biduk kita sedang berlayar menuju ke sana. Menuju kemajuan Indonesia Raya!//(54)

Dirgahayu Republik Indonesia!  
Dirgahayu Negeri Pancasila!  
Merdeka! Merdeka! Merdeka!

Terima kasih.  
*Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Om Shanti Shanti Shanti Om,  
Namo Buddhaya.*

Jakarta, 16 Agustus 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

**(Humas Setkab)**

PIDATO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI DEPAN SIDANG TAHUNAN MAJELIS PEMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017

Jakarta, 16 Agustus 2017

Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,  
Om Swastiastu,  
Namo Buddhaya,  
Salam Kebajikan.

Yang saya hormati, seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Yang saya hormati Bapak BJ Habibie, Presiden Republik Indonesia Ketiga. Yang saya hormati Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia Kelima.

Yang saya hormati Bapak Try Sutrisno dan Bapak Hamzah Haz. Yang saya hormati Bapak Boediono beserta Ibu Herawati Boediono. Yang saya hormati Ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Yang saya hormati Ibu Karlina Umar Wirahadikusumah. Hadirin sekalian yang berbahagia, Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmat-Nya, kita dapat menghadiri Sidang Tahunan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2017.

Di depan sidang yang terhormat ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh lembaga negara, atas kekompakan, sinergi dan kerjasama yang baik selama ini. Saya yakin dengan kekompakan, dengan sinergi, dengan kerja bersama itu, tidak akan memperlemah tugas dan tanggung jawab konstitusional yang dijalankan oleh setiap lembaga negara, tetapi justru memperkuat kita semua dalam memenuhi amanah rakyat.

Dalam semangat persatuan Indonesia itu, lembaga-lembaga negara justru bisa bekerja dengan lebih baik, bila saling mengingatkan, saling kontrol, saling mengimbangi dan saling melengkapi. Tidak ada satu lembaga negarapun yang memiliki kekuasaan absolut, memiliki kekuasaan yang lebih besar dari lembaga negara yang lain. Inilah jatidiri bangsa kita dalam bernegara. Inilah kekuatan bangsa kita dalam menghadapi setiap tantangan. Inilah keunggulan bangsa kita dalam menghadapi masa depan. Kekuatan yangjuga terefleksikan dalam 72 tahun perjalanan bangsa dan negara kita.

Kita harus menjadikan sejarah sebagai fondasi untuk menatap masa depan. Pelajaran yang sangat penting dari sejarah bangsa kita adalah kemerdekaan bisa kita rebut, bisa kita raih, bisa kita proklamasikan karena semua anak-anak bangsa mampu untuk bersatu, mampu untuk bekerjasama, mampu untuk kerja bersama.

Modal persatuan Indonesia yang kokoh itu harus terus kita jaga, kita rawat, kita perkuat. Dan harus jadi pijakan kita bersama dalam menghadapi ujian sejarah berikutnya yaitu memenuhi janji-janji kemerdekaan. Janji kemerdekaan untuk mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Saya percaya, tugas yang maha berat itu akan bisa kita tunaikan apabila kita semua mau bersatu, mau bekerjasama, mau kerja bersama.

Ke depan, bangsa kita menghadapi tantangan yang tidak ringan. Kita akan mengarungi samudera globalisasi. Kita akan berhadapan dengan dinamika perubahan yang sangat cepat. Kita akan menghadapi kemajuan inovasi teknologi yang destruktif. Tapi, saya yakin dengan bersatu, kita akan bisa menghadapi semua itu. Karena bangsa kita adalah bangsa besar.

Bangsa kita adalah bangsa yang teruji. Bangsa kita adalah bangsa petarung. Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, Tujuh puluh dua tahun kita merdeka, kita bersyukur atas seluruh capaian yang kita raih. Ini semua atas kerja keras dari seluruh rakyat Indonesia, kerja bersama dari lembaga-lembaga negara. Namun, kita menyadari bahwa belum semua rakyat Indonesia merasakan buah kemerdekaan. Kita menyadari bahwa manfaat pembangunan belum sepenuhnya merata di seluruh pelosok tanah air.

Kita menyadari bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum sepenuhnya kita bisa wujudkan. Untuk itu, di tahun ketiga masa bakti Kabinet Kerja ini, Pemerintah lebih fokus untuk melakukan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Kita ingin rakyat-rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, di kawasan terisolir merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keadilan sosial harus mampu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Rakyat di Aceh harus bisa merasakan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sanitasi dan air bersih maupun pelayanan transportasi, sama baiknya dengan apa yang dirasakan oleh saudara-saudaranya yang lain di seluruh pelosok negeri.

Kita ingin rakyat di perbatasan Papua, bisa memiliki rasa bangga pada tanah airnya, karena  kawasan perbatasan telah dibangun menjadi beranda terdepan dari Republik. Kita ingin rakyat Papua di pegunungan juga bisa menikmati harga BBM dan harga bahan pokok yang sama dengan saudaranya di wilayah lain Indonesia. Kita ingin rakyat Pulau Miangas bisa merasakan kehadiran Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Program Kartu Indonesia Sehat, Program Kartu Indonesia Pintar, dan Program Pemberian Makanan Tambahan untuk balita dan ibu hamil. Kita ingin rakyat di Pulau Rote juga bisa merasakan manfaat pembangunan infrastruktur, lancarnya konektivitas dan turunnya biaya logistik.

Kita ingin kualitas hidup rakyat Indonesia semakin meningkat. Walaupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita naik dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,18 di tahun 2016 kita tidak boleh cepat berpuas diri. Kita juga harus terus berupaya menekan ketimpangan pendapatan, yang saat ini Indeks Gini Rasio bisa kita turunkan dari 0,414 pada September 2014 menjadi 0,393 pada Maret 2017.

Saya yakin hanya dengan pemerataan ekonomi yang berkeadilan, kita akan semakin bersatu. Pembangunan yang merata akan mempersatukan Indonesia. Pembangunan yang berkeadilan akan membuat kita semakin kuat dalam menghadapi persaingan global. Tidak ada yang merasa menjadi warga negara kelas dua, warga negara kelas tiga. Karena semuanya adalah warga negara Republik Indonesia. Semuanya, setara mendapatkan manfaat dari pembangunan. Semuanya ikut terlibat mengambil tanggung jawab dalam kerja bersama membangun bangsa.

Kita ingin kerja bersama tidak hanya dalam pemerataan ekonomi yang berkeadilan tapi juga dalam pembangunan ideologi, politik, sosial dan budaya. Dalam bidang ideologi, kita harus terus memperkuat konsensus kebangsaan untuk menjaga Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Pemerintah telah menginisiasi pembentukan UKP-PIP untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila kepada seluruh lapisan rakyat, terutama generasi muda, penerus masa depan kita. Dalam bidang politik, kita harus menuntaskan agenda konsolidasi demokrasi sehingga semakin terlembaga. Kita bersyukur telah mampu menyelenggarakan proses demokrasi di level lokal, pilkada serentak di 101 daerah pada tahun 2017, dengan aman dan damai.

Selain pembangunan ideologi dan politik, kita tidak boleh melupakan pembangunan sosial dan kebudayaan. Kita harus mendidik anak-anak kita menjadi generasi pelanjut sejarah yang cinta pada tanah airnya, memiliki etika, budi pekerti dan sopan santun, mempunyai karakter yang kuat dan tangguh. Kita juga terus membangun kebudayaan bangsa yang berbhinneka. Ekspresi seni dan budaya dari berbagai daerah di Nusantara harus terus dibangkitkan untuk memperkaya ke-Indonesia-an kita.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, saya percaya tugas sejarah untuk Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, tidak lepas dari dukungan dan partisipasi aktif Lembaga-Lembaga Negara.

Selama setahun terakhir, MPR terus berusaha untuk menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, aspirasi masyarakat dan daerah, dan berbagai etika politik kebangsaan yang bertumpu pada nilai permusyawaratan dan perwakilan, kekeluargaan, gotong royong dalam bingkai NKRI.

Sebagai pengawal ideologi, MPR teguh menjaga Pancasila sebagai pemandu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya menyambut baik, sikap MPR yang berketetapan untuk bersinergi dengan Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila yang saya tetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 untuk sosialisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terhadap tugas pengkajian sistem ketatanegaraan UUD 1945 serta pelaksanaannya, MPR telah berhasil memformulasikan Penataan Sistem Perekonomian Nasional, yang kita harapkan dapat mendukung suksesnya pemerataan pembangunan secara berkeadilan. Adapun terhadap tugas penyerapan aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD 1945, MPR telah memfasilitasi sejumlah kegiatan kebangsaan guna memperluas penerapan etika kehidupan berbangsa dan bernegara di segenap kalangan masyarakat. Sementara itu, DPR juga terus melanjutkan reformasi internalnya dan menjadi lembaga representasi rakyat yang makin modern dan dipercaya.

Terhadap fungsi legislasi, DPR antara lain telah menyelesaikan 14 RUU pada Prioritas Program Legislasi Nasional Tahun 2017. Beberapa di antaranya berkaitan langsung dengan dukungan kelancaran program Pemerintah selama tahun 2017 seperti peningkatan ekspor non-migas barang dan jasa yang bernilai tambah tinggi, penyederhanaan perizinan serta penyediaan layanan dan fasilitas untuk investasi.

Adapun terhadap fungsi pengawasan jalannya pemerintahan, DPR telah membentuk 46 panitia kerja di berbagai ranah pembangunan, serta menyelenggarakan uji kepatutan dan kelayakan atas usulan pengangkatan sejumlah pejabat publik. Uji kepatutan dan kelayakan itu antara lain terhadap Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan; Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan  Pengawas Pemilu; serta Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia. DPR juga memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap 23 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk negara-negara sahabat.

Yang tidak kalah penting adalah DPR juga melanjutkan diplomasi parlemen untuk memperkuat kerjasama Indonesia dengan negara-negara sahabat guna memperjuangkan kepentingan nasional dan pencarian solusi atas berbagai permasalahan internasional. Diplomasi itu dilakukan melalui Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR dengan Parlemen Negara-negara Sahabat. DPR saat ini telah membentuk 49 GKSB serta berperan aktif dalam forum kerja sama antar-parlemen internasional.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-tanah Air, di sisi lain, DPD terus memantapkan peran konstitusionalnya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dan daerah. Sungguh kita berbesar hati karena DPD telah menunjukkan kinerja dan kematangannya dalam melewati masa-masa sulit konsolidasi internalnya.

Di tengah tantangan itu, kerja keras DPD hingga semester pertama tahun 2017 ini telah menghasilkan 10 pertimbangan terhadap RUU dan 5 pertimbangan berkaitan dengan anggaran serta 13 hasil pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang tertentu. Beberapa di antara pertimbangan itu ada yang sangat kita perlukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di daerah-daerah, seperti pertimbangan atas RUU tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara dan RUU tentang Kewirausahaan Nasional serta pengawasan atas pelaksanaan UU tentang Desa.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, dalam pengawalan pengelolaan keuangan negara, BPK terus berupaya menempuh langkah terobosan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara di pusat maupun daerah. Kita bersyukur pada tahun 2016, untuk pertama kalinya dalam sejarah pembangunan nasional, BPK merilis opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap pengelolaan keuangan pemerintah. Terhadap pelaksanaan tugas itu, BPK antara lain telah bersinergi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. Melalui sinergi itu, dapat diatasi kondisi pemeriksaan yang tumpang tindih yang terjadi beberapa tahun terakhir.

BPK juga telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Melalui penerapan sistem itu, BPK dapat memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan di setiap Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, secara lebih akurat, efisien dan tepat waktu.

Kita juga apresiasi BPK yang sejak tahun lalu, terpilih menjadi auditor eksternal bagi Badan Energi Atom Internasional periode 2016-2020. Keterpilihan BPK itu bukan saja menjadi wujud pengakuan internasional atas kinerjanya, namun juga mengangkat nama baik dan reputasi bangsa Indonesia.

Pada pembangunan bidang hukum, Mahkamah Agung terus berupaya mempermudah masyarakat dalam perolehan keadilan dan layanan publik. Hingga semester pertama tahun 2017, MA telah berhasil menerapkan beberapa inovasi antara lain Sistem Audio Text Recording dan Mekanisme Penghitungan Biaya Perkara Sendiri secara elektronik guna makin memudahkan layanan peradilan. MA juga terus memperluas pelayanan masyarakat di wilayah terpencil, melalui program sidang keliling dan sidang di luar gedung pengadilan.

Selain inovasi peningkatan layanan publik, MA juga melanjutkan Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan. Hingga bulan Juni 2017, telah berhasil mengakreditasi 186 pengadilan. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi terus bekerja dan mengukuhkan perannya sebagai penjaga konstitusi.

Sampai pertengahan tahun 2017, dari 55 perkara yang diterima, seluruhnya telah diputuskan oleh MK. Beberapa di antaranya termasuk perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Keberhasilan MK dalam memutus perkara itu, telah mengantarkan MK meraih penghargaan Bawaslu Award Tahun 2017. Dalam melaksanakan perannya sebagai pengawal nilai-nilai demokrasi, pada tahun 2017 ini, MK berhasil mempertahankan kepercayaan komunitas internasional sebagai Sekretariat Tetap dari Mahkamah Konstitusi se-Asia.  
  
Kita juga apresiasi upaya Komisi Yudisial dalam memajukan akuntabilitas peradilan di Tanah Air. KY telah menyelesaikan 8 kasus advokasi hakim serta melakukan pemantauan 89 persidangan atas laporan masyarakat. KY juga telah memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku bagi 277 hakim. Dalam pemeliharaan martabat peradilan, KY telah merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 33 hakim, mulai dari sanksi ringan hingga sanksi berat.  
  
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, Hadirin yang saya muliakan, Sekali lagi, semua capaian itu seharusnya tidak membuat kita cepat berpuas diri. Karena tantangan yang kita hadapi sekarang ini dan ke depan tidaklah ringan. Kita masih dihadapkan dengan kemiskinan dan ketidakadilan; kita masih dihadapkan dengan ketidakpastian ekonomi global, dan kita juga masih dihadapkan dengan gerakan ekstrimisme, radikalisme, dan terorisme.  
  
Namun, dari sekian banyak tantangan itu, tantangan yang paling penting dan seharusnya menjadi prioritas bersama dari semua lembaga negara adalah mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari rakyat. Kepercayaan rakyat adalah jiwa dan sekaligus energi bagi lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.  
  
Saya mengajak kita semua, seluruh lembaga negara untuk menjadikan rakyat sebagai poros jiwa kita. Saya mengajak kita semua untuk selalu mendengar amanat penderitaan rakyat. Saya mengajak kita semua untuk bergandengan tangan, bekerjasama, kerja bersama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  
Akhirnya dengan semangat persatuan Indonesia, saya yakin kita akan mampu menjalankan tugas konstitusional kita, menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang mandiri, berdaulat, dan berkepribadian.  
  
Dirgahayu Republik Indonesia!  
Dirgahayu Negeri Pancasila!  
Terima kasih,  
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Om Shanti Shanti Shanti Om,  
Namo Buddhaya.

Berikut ini pidato lengkap Jokowi yang disampaikan dalam Sidang Tahunan DPR-DPD, Rabu (16/8/2017):   
  
Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Damai Sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.  
  
Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara. Yang saya hormati Bapak BJ Habibie, Presiden Republik Indonesia Ketiga. Yang saya hormati Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia Kelima. Yang saya hormati Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia Keenam, beserta Ibu Ani Yudhoyono.   
  
Yang saya hormati Bapak Try Sutrisno dan Bapak Hamzah Haz. Yang saya hormati Bapak Boediono beserta Ibu Herawati Boediono. Yang saya hormati Ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Yang saya hormati Ibu Karlina Umar Wirahadikusumah. Yang saya hormati, Para Duta Besar Negara- Negara Sahabat dan para Pimpinan Perwakilan Badan dan Organisasi Internasional; Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air.  
  
Marilah kita bersama-sama bersyukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita dapat menghadiri Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk memperingati 72 tahun Indonesia Merdeka. Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,   
  
Dalam berbagai kesempatan, saya selalu katakan, kita ini adalah bangsa yang besar. Sekali lagi, Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Besar, bukan hanya karena jumlah penduduknya yang lebih dari 250 juta jiwa. Besar, bukan hanya karena memiliki 17 ribuan pulau. Besar, bukan hanya karena sumber daya alam yang melimpah. Tapi, kebesaran Indonesia karena bangsa ini sudah teruji oleh sejarah, bisa tetap kokoh bersatu sampai menginjak usianya ke-72 tahun. Sementara di beberapa negara lain, dilanda konflik kekerasan antarsuku, perpecahan antaragama, pertikaian antargolongan, kita bersyukur kita tetap bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Bahkan sekarang ini, kita menjadi rujukan banyak negara dalam hal mengelola kebhinnekaan dan membangun persatuan.   
Kita adalah bangsa petarung yang berani berjuang dengan kekuatan sendiri meraih kemerdekaan. Kita merebut kemerdekaan berkat perjuangan para pahlawan kita, ulama kita, para santri, pemimpin agama-agama kita, dan pejuang dari seluruh pelosok Nusantara.  
  
Semua itu harus membuat kita semakin bangga pada Indonesia, negeri yang kita cintai bersama. Semua itu, harus membuat kita percaya diri untuk menghadapi masa depan. Kita harus meninggalkan warisan kolonialisme, yang menjadikan bangsa kita bermental budak, karakter rendah diri, pecundang dan selalu pesimis dalam melihat hari esok. Kita harus membuang jauh-jauh mentalitas negatif yang membuat sesama anak bangsa saling mencela, saling mengejek dan saling memfitnah. Karena kita adalah bersaudara, saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air.  
  
Kita harus membangun fondasi kultural yang kuat. Kita harus bersatu dan berdiri gagah untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks, yang semakin ekstrim, dan berubah dengan sangat cepat. Hanya bangsa yang cepatlah yang akan memenangi persaingan global. Kita harus ingat bahwa kita pernah menjadi tempat bagi negara lain untuk belajar, belajar tentang Islam, belajar tentang seni budaya, belajar tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dan lain-lain. Kebanggaan inilah yang harus kita rebut kembali, kebanggaan terhadap kreasi dan karya sendiri, kebanggaan terhadap produk sendiri.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,   
  
Sebagai bangsa yang besar dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, mempunyai ratusan suku dan ribuan pulau, bangsa Indonesia harus percaya diri untuk meraih kemajuan, mengejar ketertinggalan dan mewujudkan kejayaan. Kita harus percaya pada kekuatan bangsa kita sendiri. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa kita mampu untuk meraih kemajuan. Dulu kita takut terhadap masuknya bank-bank asing ke negeri kita. Ternyata bank-bank nasional kita mampu bersaing dan kini telah menjadi bank-bank yang besar, dan modern.   
  
Kita memiliki kekuatan yang sungguh luar biasa yakni anak-anak muda. Anak-anak muda kita banyak yang menjadi juara olimpiade matematika, fisika, dan biologi. Anak-anak muda kita telah menunjukan prestasi mereka, mulai dari menjadi juara hafidz Al-Qur'an, berprestasi dalam karya robotik, sangat inovatif sebagai start-up, dan juga kreatif dalam berkesenian sampai di panggung-panggung dunia  
  
Demikian pula dengan industri kreatif dan film-film nasional kita, yang banyak digerakkan oleh anak-anak muda, semakin digemari dan ditonton oleh banyak orang.  
Tapi semua keunggulan itu tidak harus membuat kita terlena, membuat kita berpuas diri. Masih banyak pekerjaan yang harus kita tuntaskan. Masih banyak janji kemerdekaan yang harus kita tunaikan. Sebagai refleksi bersama, kita harus jujur mengakui bahwa tidak mungkin bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, kalau rumah-rumah rakyat kita di seluruh pelosok nusantara tidak menikmati aliran listrik.  
  
Tidak mungkin kita menjadi negara yang kompetitif ketika biaya logistik kita mahal. Tidak mungkin kita menjadi Poros Maritim Dunia, kalau kita tidak mempunyai pelabuhan- pelabuhan yang menjadi tempat bersandar kapal-kapal besar yang mengangkut produk-produk kita. Tidak akan mungkin menjadi bangsa yang berdaulat di bidang pangan, kalau jumlah bendungan dan saluran irigasi yang mengairi lahan-lahan pertanian kita di seluruh penjuru Tanah Air, sangat terbatas  
  
Kita juga menghadapi tantangan untuk terbebas dari jebakan sumber daya alam. Setelah selesainya booming migas di tahun 1970an, selesainya booming kayu di tahun 1990an, era booming mineral juga telah berakhir. Bahkan beberapa komoditas lainnya merosot tajam. Karena itu kita harus berubah.

Saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote,  
  
Kita harus menyelesaikan semua masalah secara cepat. Itu artinya kita juga harus membuat garis tegas. Kita tidak boleh ragu menjaga kedaulatan kita, menjaga laut kita, menjaga perbatasan kita, menjaga sumber daya alam kita.  
  
Kita harus berani melawan pencurian sumber daya laut kita. Kita berani menenggelamkan kapal ilegal untuk melindungi nelayan kita. Kita harus berani menjaga setiap jengkal bumi pertiwi untuk kemakmuran rakyat kita. Kita berani bubarkan Petral. Kita berani alihkan subsidi untuk hal-hal yang produktif.  
  
Kita tegas menyatakan perang pada bandar- bandar Narkoba yang merusak masa depan generasi muda kita. Kita harus tegas menghadapi infiltrasi ideologi seperti ekstrimisme, radikalisme, terorisme yang merusak sendi-sendi negara kita.  
Tidak ada halangan bagi kita untuk menarik garis tegas karena kita berpegang teguh pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita berani bersikap tegas karena kita memiliki Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan jiwa kita semua.  
  
Pancasila adalah pemersatu kita semua, yang harus kita hayati, yang harus kita amalkan, yang harus menjadi ideologi yang bekerja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, Pemerintah mengambil inisiatif membentuk Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKP-PIP yang mendapatkan tugas melakukan pembinaan ideologi kepada seluruh elemen rakyat, termasuk generasi muda, penerus masa depan bangsa.   
  
Saudara-saudaraku di Sabang, Salamu'alaikum, Kruen Semangat!  
  
Untuk memenuhi janji kemerdekaan, mengharuskan kita bekerja lebih fokus. Pada tahun pertama Kabinet Kerja, Pemerintah telah meletakkan pondasi pembangunan nasional yang kokoh melalui transformasi fundamental perekonomian dan meletakkan kembali paradigma Indonesia Sentris.  
  
Pada tahun kedua, Pemerintah mendorong percepatan pembangunan nasional, baik pembangunan infrastruktur fisik, mempercepat pembangunan sumber daya manusia, serta meningkatkan daya saing untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain. Kita juga melakukan percepatan deregulasi ekonomi dengan mengeluarkan beberapa paket Kebijakan Ekonomi. Pada tahun ketiga, Pemerintah bergerak lebih maju lagi, fokus pada kebijakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Tahun 2017 ini adalah tahun kerja bersama untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.   
  
Kita ingin seluruh rakyat Indonesia, di seluruh pelosok tanah air bisa merasakan manfaat dari pembangunan. Rakyat di Aceh, di Papua, Pulau Miangas dan Pulau Rote bisa menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata. Kita ingin para petani, nelayan, buruh, ulama, pedagang pasar, tokoh agama, guru, aparatur sipil negara, TNI, POLRI, pers, budayawan, mahasiswa, dan lainnya bisa bergerak bersama, maju bersama, sejahtera bersama.  
  
Kita tidak ingin kesejahteraan hanya dinikmati oleh seseorang atau sekelompok orang. Inilah janji kemerdekaan yang harus kita segera wujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut mewujudkan ketertiban dunia.

Kesanalah kita bergerak. Dalam tiga tahun terakhir ini, Pemerintah fokus untuk memerangi kemiskinan, menekan ketimpangan, dan mengurangi pengangguran. Hasilnya, tingkat kemiskinan di Indonesia turun, dari 28,59 juta orang pada Maret tahun 2015 menjadi 27,77 juta orang pada Maret tahun 2017. Begitu juga Indeks Rasio Gini Indonesia, yang mengukur tingkat kesenjangan ekonomi, terus membaik dan mencapai 0,393 di bulan Maret 2017, turun dibandingkan dengan angka bulan September 2014 yaitu 0,414.  
  
Angka inflasi kita juga terkendali di tingkat 2,6 persen dari bulan Januari hingga Juli tahun 2017. Bahkan di bulan Mei 2017, yaitu menjelang bulan puasa, tercatat inflasi kita hanya sebesar 0,39 persen.  
Pertumbuhan ekonomi juga terus kita jaga agar berkualitas dan berkeadilan. Kita harus memastikan pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 5 persen per tahun pada periode 2014-2016, bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang tapi bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, pembangunan yang kita jalankan bersama bukan hanya untuk yang tinggal di kota-kota tapi untuk seluruh anak bangsa, baik yang tinggal di pedesaan, daerah-daerah pinggiran, pulau-pulau terdepan, maupun kawasan perbatasan.   
  
Kita ingin rakyat di perbatasan menjadi bangga menjadi bagian dari Warga Negara Republik Indonesia. Kita ingin rakyat-rakyat di perbatasan merasakan kehadiran Negara melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Motaain dan Motamasin- NTT, Skouw-Papua, Entikong-Kalimantan Barat, Aruk- Kalimantan Barat, dan Nanga Badau-Kalimantan Barat. PLBN adalah beranda terdepan Indonesia yang kita harapkan memunculkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru sehingga pembangunan menjadi lebih merata di seluruh pelosok negeri.  
  
Untuk mempercepat pemerataan pembangunan di daerah dan desa, Pemerintah meningkatkan anggaran transfer ke daerah dan dana desa. Melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Pemerintah meningkatkan akses rakyat untuk mendapatkan pelayanan infrastruktur dasar seperti jaringan air minum sampai ke rumah-rumah warga. Pemerintah juga mendorong pergerakan ekonomi daerah dengan peningkatan presentase kemantapan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota dan mendukung irigasi pertanian.  
  
Komitmen pemerataan ekonomi juga diwujudkan melalui peningkatan Dana Desa, yang pada tahun 2017 ini besarnya Rp60 trilliun. Dengan dana desa ini, Pemerintah mendorong percepatan pertumbuhan serta pemerataan ekonomi desa. Dalam mendukung pemerataan, Pemerintah juga mendorong peningkatan rasio elektrifikasi nasional yang mencapai 92 persen pada bulan Maret tahun 2017. Dalam sidang yang terhormat ini, saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada warga Desa Wogalirit, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, setelah 72 tahun merdeka, sekarang akhirnya bisa menikmati layanan listrik. Selamat juga untuk warga desa-desa lain di seluruh Tanah Air, yang tahun 2017 ini bisa menikmati layanan listrik. Keinginan untuk melakukan pemerataan yang berkeadilan bukanlah sekedar slogan, kita harus betul-betul wujudkan secara konkret. Bertahun-tahun Saudara-saudara kita di Tanah Papua harus membeli BBM dengan harga sangat mahal, harganya berpuluh- puluh kali lipat dengan harga yang dibeli oleh saudara kita di pulau Jawa atau Sumatera.   
Hal ini tidak boleh terjadi di Negeri Pancasila. Untuk itu, Pemerintah menerapkan kebijakan BBM satu harga, sehingga Saudara-saudara kita di Tanah Papua menikmati harga yang sama dengan harga di Jawa dan daerah lain di Indonesia.

Saudara-saudaraku di Merauke, Namek-Namuk, Izakod Bekai Izakod Kai, Satu Hati Satu Tujuan Tujuh puluh dua tahun kita merdeka, ketika negara-negara lain sudah menatap angkasa luar, di negara kita tercinta, urusan sertifikasi lahan untuk rakyat belum tuntas-tuntas juga.   
  
Akibatnya, terjadi sengketa lahan baik antarwarga, antara warga dengan korporasi atau bahkan antara warga dengan pemerintah. Karena itu, melalui Kebijakan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pemerintah melakukan percepatan sertifikasi lahan yang sekarang sudah mencapai 250 ribu bidang. Pemerintah juga sedang menjalankan redistribusi tanah untuk masyarakat dan sudah memberikan 707 ribu hektar kawasan hutan kepada masyarakat adat untuk dikelola secara produktif. Selain itu, juga sedang dijalankan Program Perhutanan Sosial sehingga rakyat di lapisan 40 persen terbawah mendapatkan akses untuk memanfaatkan hutan bagi kesejahteraan mereka.  
  
Pemerintah juga terus melanjutkan program- program kerakyatan yang sudah dijalankan sejak tahun pertama Kabinet Kerja, utamanya Program Keluarga Harapan (PKH), Program Perlindungan Nelayan, Program Percepatan Pembangunan Rusunawa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan program peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Agar bisa menjangkau 40 persen lapisan terbawah Pemerintah melakukan reformasi kebijakan sehingga subsidi betul-betul lebih tepat sasaran. Pemerintah secara bertahap mensinergikan antar program bantuan sosial serta melakukan pengalihan Beras Sejahtera (Rastra) secara bertahap menjadi bantuan pangan non- tunai. Selain itu, keberpihakan pada 40 persen lapisan terbawah juga dilakukan melalui penguatan program- program perlindungan sosial dan perluasan cakupan penerima manfaat.  
  
Untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah juga terus berusaha menekan tingkat suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sekarang ini suku bunga KUR bisa di angka 9 persen. Kita berharap Rp94,4 triliun KUR yang sudah disalurkan di tahun 2016 dapat ikut mengangkat kesejahteraan sektor UMKM. Dengan akses permodalan yang lebih mudah itu, maka kita berharap bisa menggerakkan ekonomi rakyat terutama kalangan pedagang-pedagang kecil. Selain mempermudah akses permodalan, kita juga melakukan revitalisasi pasar sehingga para pedagang bisa berdagang dengan nyaman dan tidak kalah bersaing dengan pasar-pasar modern.

Saudara-saudaraku di Miangas, Tabea, Sansiote Sang Patepate. Salam, Kebersamaan dalam Persatuan  
  
Kita harus ingat bahwa membangun Indonesia adalah membangun manusia Indonesia. Alhamdulillah, kerja bersama kita selama ini dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia telah menuai hasil yang menggembirakan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia bergerak naik dari negara kategori medium high development menjadi negara dalam kategori high human development, dengan angka IPM naik dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,18 tahun 2016.  
  
Kenaikan IPM tersebut tidak terlepas dari kerja bersama kita dalam meningkatkan cakupan Program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk anak balita dan ibu hamil. Pembangunan sumber daya manusia akan terus berlanjut. Pemerintah bukan hanya konsentrasi untuk mengurangi dampak kekurangan gizi kronis, menekan angka stunting, tapi juga menyiapkan generasi muda yang berkualitas, yang terampil dan siap untuk berkompetisi. Untuk itu, Pemerintah menginisiasi peningkatan kompetensi tenaga kerja, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Kita terus memperbanyak dan memperkuat pendidikan SMK dan Politeknik yang harus memiliki keterkaitan dengan dunia industri. Semuanya dilakukan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan tangguh.   
  
Saudara-saudaraku di Rote,  
Ita Esa, Kita adalah Satu Kesatuan Pembangunan manusia serta infrastruktur sosial berjalan beriringan dengan percepatan pembangunan infrastruktur fisik. Agar anak-anak kita bisa belajar dengan baik maka pembangunan sarana dan prasarana pendidikan terus ditingkatkan.  
  
Seiring dengan penyiapan sumber daya manusia Indonesia, Pemerintah juga membangun sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru, kawasan-kawasan industri baru di Luar Jawa seperti Kawasan Industri Sei Mangkei di Sumatera Utara dan Kawasan Industri Morowali di Sulawesi Tengah.  
  
Pengembangan kawasan industri itu didukung oleh pembangunan infrastruktur transportasi untuk memperlancar konektivitas yang menghubungkan setiap jengkal wilayah Nusantara. Kita juga ingin seluruh wilayah Indonesia terhubung baik melalui udara, laut maupun darat. Untuk itu, kita membangun bandara perintis, pelabuhan, jalan paralel perbatasan di Kawasan Perbatasan Wilayah Kalimantan Timur, jalan lintas perbatasan di Papua, dan jalan sabuk perbatasan di Provinsi NTT.  
  
Perekonomian daerah, terutama di kawasan pinggiran tidak akan bisa bergerak dengan cepat apabila tidak ada tenaga listrik dan prasarana telekomunikasi. Untuk itu, Pemerintah terus mendorong pembangunan energi listrik di 31 lokasi prioritas dan meneruskan pembangunan berbagai Base Transceiver Station (BTS) sehingga kecamatan-kecamatan di perbatasan dan garis perbatasan NKRI dapat mengakses telepon dan informasi. Saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Kita akan menjadi bangsa maju yang diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia apabila kita memiliki daya saing. Salah satu penggerus daya saing kita adalah korupsi. Ini musuh kita bersama. Karena itu, di depan Sidang Bersama yang terhormat ini, saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama memerangi korupsi. Pemerintah mendukung setiap usaha, dari semua pihak, dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta memperkuat KPK.

Selain memerangi korupsi yang menggerogoti APBN, menggerogoti uang rakyat, kita juga terus menguatkan sistem dan basis data perpajakan nasional. Untuk itu Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Sidang Anggota Dewan yang terhormat, yang telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Kita optimis bahwa dengan Perppu tersebut, APBN Indonesia akan semakin kokoh karena sumber kekuatannya berasal langsung dari rakyat, dan setiap rupiahnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Selain itu, Indonesia juga semakin siap menyambut era keterbukaan informasi internasional yang memberlakukan Sistem Pertukaran Informasi Otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI).  
Selanjutnya, dalam menatap daya saing Indonesia ke depan, kita harus mengantisipasi perubahan dunia yang sangat cepat dan serba digital. Kita harus terus meningkatkan efisiensi dan daya saing nasional dengan terobosan digital di kerja-kerja birokrasi, pelayanan rakyat, pengembangan UMKM, cara kerja ekonomi nasional dan penyaluran bantuan sosial dan subsidi Non-Tunai.   
Pemerintah juga memangkas berbagai regulasi dan pita birokrasi yang panjang yang selama ini telah membelenggu ekonomi Indonesia, terutama melalui 15 Paket Kebijakan Ekonomi yang telah dijalankan sejak tahun 2015. Hasil dari berbagai Paket Kebijakan Ekonomi itu terlihat dengan semakin meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap ketangguhan ekonomi Indonesia. Dalam peringkat Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business/EODB), posisi Indonesia meningkat dari peringkat 106 pada tahun 2016, menjadi peringkat 91 pada tahun 2017. Begitu pula Indonesia mendapat peringkat investment grade atau layak investasi dari tiga lembaga pemeringkat internasional yang kredibel, yaitu Standard and Poor's Global Ratings, Fitch Ratings, dan Moody's. Bahkan di dalam survei bisnis oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), posisi Indonesia naik ke peringkat 4 sebagai negara tujuan investasi prospektif.   
  
Anggota Dewan yang terhormat, Hadirin sekalian yang saya muliakan, Salah satu janji kemerdekaan seperti tercantum dalam pembukaan konstitusi adalah kita ikut serta dalam upaya memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal itu mengharuskan kita semua untuk menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif. Dalam diplomasi internasional, salah satu keaktifan dan kepemimpinan Indonesia ditunjukkan dengan mendorong Myanmar untuk menyelesaikan konflik di Rakhine state melalui pembangunan yang lebih inklusif, menghormati HAM, dan melindungi semua komunitas. Indonesia juga telah menampung 1.806 migran akibat konflik tersebut, mengirimkan bantuan kemanusiaan, dan membangun sekolah-sekolah di Myanmar.

Kita juga memberikan dukungan penuh pada kemerdekaan Palestina. Kita telah membuka Konsulat Kehormatan di Ramallah, Palestina. Kita juga terus mendorong ASEAN dan PBB untuk mendukung kemerdekaan Palestina.  
  
Indonesia juga mengecam keras pembatasan beribadah di Masjid Al-Aqsa bulan Juli 2017. Diplomasi Indonesia bergerak membela rakyat Palestina antara lain dengan mengusulkan proteksi internasional di Kompleks Al-Aqsa.  
  
Sedangkan dalam diplomasi ekonomi, mesin diplomasi kita juga terus bergerak menggarap pasar- pasar non-tradisional di Afrika, Timur Tengah, dan Asia. Selama setahun ini, PT INKA berhasil mengekspor 150 gerbong kereta api ke Bangladesh, PT Dirgantara Indonesia mengekspor pesawat CN 235 ke Senegal dan Thailand. Perlindungan warga negara kita di luar negeri juga menjadi komitmen kita bersama. Selain kita melakukan langkah-langkah perlindungan dan pendampingan pada pekerja migran, kita juga telah berhasil membebaskan sebagian besar WNI yang diculik kelompok teroris di Mindanao dan mengevakuasi WNI yang terjebak dalam konflik ISIS Marawi.   
  
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,  
  
Di tengah gelombang globalisasi yang berubah cepat dan ekstrim, kemandirian bangsa Indonesia adalah pilar yang sangat penting guna mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menegakkan keadilan sosial. Pemerintah terus bekerja keras untuk mewujudkan kedaulatan pangan, dengan meningkatkan produksi bahan pangan strategis, utamanya padi, jagung, daging sapi, cabai, dan bawang merah.  
Pemerintah juga terus memperkuat kemandirian bangsa melalui inovasi teknologi dan pembangunan pembangkit listrik energi baru terbarukan serta mendorong kenaikan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam pembangunan pembangkit tenaga listrik.   
  
Segenap rakyat Indonesia yang saya kasihi, Anggota Dewan yang saya hormati, Dalam kesempatan ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingin menegaskan pentingnya demokrasi serta stabilitas politik dan keamanan guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui demokrasi, kita menjaga kedaulatan rakyat dan kerukunan dalam keragaman. Kita patut bersyukur bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2017 di 101 daerah berjalan dengan aman dan damai. Pemerintah mengucapkan terima kasih atas gotong royong semua pihak, dari lembaga penyelenggara pemilu tingkat pusat dan daerah, aparat TNI dan POLRI, segenap partai politik, termasuk kepada semua calon kepala daerah dan calon wakilnya.  
  
Paling utama, Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia yang sudah memberikan suaranya, sebagai wujud kegembiraan berpolitik dan kematangan berdemokrasi. Saya mengajak kita semua untuk terus kerja bersama merawat kematangan demokrasi Indonesia, terutama di Pilkada Serentak tahun 2018.

Sebagai bagian penting dalam menjaga momentum kegembiraan demokrasi rakyat itu, Pemerintah terus memperhatikan stabilitas keamanan, serta mendorong peningkatan kemampuan, profesionalitas, dan kesejahteraan TNI dan POLRI. Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia berterimakasih pada TNI karena selalu setia pada NKRI, selalu siaga menjaga kedaulatan bangsa dan negara, termasuk dari infiltrasi gerakan terorisme global. Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia juga berterimakasih pada POLRI karena selalu menjaga rasa aman masyarakat, termasuk keberhasilan POLRI, BNN, dan Ditjen Bea Cukai dalam membongkar penyelundupan 1 ton sabu. Ke depan, TNI dan POLRI harus terus kita perkuat sebab tantangan ke depan sangat kompleks dan berubah sangat cepat. Tantangan pertahanan dan keamanan yang kita hadapi tidak lagi dalam paradigma Jawa Sentris, melainkan Indonesia Sentris. Karena itu, gelar pasukan TNI, serta strategi pertahanan kita, harus bisa menjaga setiap jengkal tanah, setiap ombak lautan, dan setiap kaki langit Tanah Air Indonesia.   
  
Sedangkan jenis ancaman yang kita hadapi sekarang bukan lagi hanya serbuan dari negara lain tetapi ancaman baru berupa gerakan ekstrimisme, radikalisme, terorisme, perdagangan manusia, kejahatan narkoba, penyelundupan senjata, dan kejahatan siber.  
  
Karena itu, saya serukan kepada seluruh rakyat Indonesia, untuk terpanggil menjalankan tugas dan tanggungjawab kebangsaan kita untuk ikut serta bela negara. Di manapun kita berada, apapun pendidikan kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, semua punya hak, semua punya kewajiban, semua punya kesempatan yang sama untuk bela negara.   
  
Hadirin yang saya muliakan, Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,   
  
Sebagai penutup Pidato Kenegaraan di depan Sidang Terhormat ini, saya mengajak kita semua yang diberi amanat oleh rakyat, yang sedang memanggul mandat dari rakyat, agar tetap teguh menjadikan kesejahteraan umum dan keadilan sosial sebagai haluan kerja kita, sebagai tujuan kerja bersama kita, demi terwujudnya Indonesia Raya. Maka dari Sabang, dari Merauke, dari Miangas, dari Rote, mari kita bersama-sama berseru:  
  
Dirgahayu Republik Indonesia! Dirgahayu Negeri Pancasila!   
  
Terima kasih   
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Om Shanti Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya.   
  
  
Jakarta, 16 Agustus 2017  
Presiden Republik Indonesia   
  
  
**Joko Widodo**